

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik saat ini menghadapi tekanan signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan mempertimbangkan biaya ekonomi, biaya sosial, dan dampak negatif dari aktivitas mereka. Tuntunan ini mendorong penerimaan dan pengakuan akuntansi sebagai ilmu yang esensial dalam pengelolaan urusan publik. Awalnya, akuntansi sektor publik merupakan aktivitas terspesialisasi dalam profesi yang relatif kecil. Namun, saat ini akuntansi sektor publik mengembangkan menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. definisi “Sektor Publik” beragam karena luasnya cakupan dan keragaman sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, poliitk, hukum, dan sosial. Dari perspektif ekonomi, sektor publik adalah entitas menghasilkan barang dan jasa publik untuk memenuhi kebutuhan hak publik. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang secara sistematis mencatat, menilai, dan mengidentifikasi seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, meliputi Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Hasil dari Akuntansi Keuangan Daerah adalah laporan keuangan yang ditujukan kepada berbagai pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kreditur, Donatur, dan Stakeholder lainnya (Yuesti dkk., 2020).

Kota Jambi, Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki wilayah $\pm 205,38 \text{ km}^2$ Secara topografis, kota ini terletak pada ketinggian 10-60 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. sebelum pembentukan Provinsi Jambi, Kota Jambi (dahulu dikenal dengan Karesidenan Jambi) merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946, yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 9 Tahun 1956 (Localise Sdgs Indonesia, 2018). Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan

akuntabel, mengacu pada dua landasan hukum utama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman baku pencatatan keuangan di seluruh entitas pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menegaskan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jambi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Jambi mengalami kelebihan pembayaran honorarium sebesar 811,11 juta; kelebihan pembayaran sebesar 1,43 miliar pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan; dan mengakibatkan potensi kerugian atas pemusnahan gedung dan bangunan ex. Rumah Pintar/Graha Lansia milik Pemerintah Kota Jambi (BPK, 2023). Walikota Jambi, Syarif Fasha menyebutkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2022 sebesar 479,170 miliar, dan terealisasi sebesar 436,885 miliar atau 91,18 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD tahun 2021 sebesar 384,007 miliar, maka PAD tahun 2022 meningkat 13,74 persen atau sebesar 52 miliar lebih; Target penerimaan Pendapatan Transfer pada tahun 2022 sebesar 1,91 triliun rupiah, dan terealisasi sebesar 1,230 triliun atau sebesar 103,29 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar 1,91 triliun, maka Dana Perimbangan tahun 2022 meningkat 3,31 persen sebesar 39,414 miliar rupiah. Sedangkan untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 tidak memiliki target penerimaan. Namun, terealisasi sebesar 897 juta dari penerimaan Pendapatan Hibah. Target Belanja Daerah sampai dengan perubahan APBD tahun 2022 adalah sebesar 1,812 triliun lebih, dengan capaian realisasi sebesar 1,622 triliun atau 89,52 triliun lebih, dengan capaian realisasi sebesar 1,622 triliun atau 89,52 persen (belum diaudit BPK-RI), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 1,250 triliun rupiah, Belanja Modal sebesar 368,629 miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar 3,208 miliar serta Belanja Transfer 100 miliar. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran Belanja tahun 2021 sebesar 1,740 triliun, maka Belanja Pemerintah Kota Jambi

tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,75 persen atau minus 117,5 miliar lebih (Walikota, 2022).

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2020-2022 (dalam rupiah)**

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Pendapatan Daerah	1.621.827.275.396,39	1.652.948.449.754,68	1.668.797.755.118,80
Pendapatan Asli Daerah	355.674.818.034,49	384.730.643.791,46	437.025.956.388,00
Pendapatan Transfer	1.192.943.798.615,90	1.206.026.802.746,00	1.230.873.892.188,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	73.208.658.746,00	62.191.003.217,22	897.906.542,80
Belanja Daerah	1.665.932.584.837,45	1.740.357.878.019,78	1.622.747.432.178,57
Belanja Operasi	1.180.536.624.523,53	1.238.942.121.720,85	1.250.909.815.843,08
Belanja Modal	444.351.878.183,92	495.805.792.008,94	368.629.083.248,49
Belanja Tak Terduga	41.044.082.130,00	5.609.964.289,00	3.208.533.087,00
Penerimaan Daerah	211.177.186.101,02	249.088.085.423,59	215.092.419.627,49
Pembiayaan Bersih	211.177.186.101,12	247.088.085.423,59	142.092.419.627,49
SiLPA	165.288.991.024,06	159.678.657.158,49	188.042.742.567,72

(Sumber: BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan. Belanja beserta realisasinya yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Laporan realisasi anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai laporan pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam tahun anggaran 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, yang salah satu isinya mewajibkan OPD membuat Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Laporan Keuangan (Pirngadi, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya. Optimalisasi PAD esensial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan PAD yang efektif termasuk dalam perbaikan fasilitas umum, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAD juga berfungsi sebagai indikator tingkat kemandirian dalam mengelola keuangannya (BPS, 2023). Belanja Daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah yang akan masuk ke dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus (Yuesti dkk., 2020). Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dialokasikan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud. Aset ini memiliki nilai manfaat yang melebihi satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Contoh aset yang termasuk dalam Belanja Modal adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya (BPS, 2023).

Terkait PAD dan Belanja Modal, penelitian yang dilakukan (Lathifa & Haryanto, 2019) mendapatkan temuan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah.

Penelitian yang dilakukan (Sihaloho, 2023) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada level rendah sekali dengan pola instruktif, rasio derajat desentralisasi, termasuk kategori kurang, rasio efektivitas tergolong sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja tergolong efisien.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan upaya resmi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai laba dan posisi kas tertentu. Dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan, dapat diamati potensi pertumbuhan dan perkembangan keuangan suatu perusahaan dengan memanfaatkan sumber yang dimilikinya. Konteks pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik, terdapat beberapa rasio pengukuran, seperti rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian pertumbuhan, dan rasio ketergantungan keuangan daerah (Hery, 2018).

Analisis varians anggaran adalah metode pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dan realisasi, tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu apakah terjadi overspending atau underspending. Analisis varians dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pendapatan dan yang dianggarkan. Analisis varians adalah metode sederhana yang memberikan informasi berharga tentang kinerja belanja pemerintah daerah. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat diketahui secara langsung besarnya selisih antara anggaran dan realisasinya. Selisih ini dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau presentase (Mahsun, 2006). Analisis varians didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang direncanakan (anggaran) dan hasil aktual yang diukur dalam mata uang. Selisih anggaran mengacu pada perbedaan antara angka anggaran yang ditetapkan dalam angka realisasi yang sebenarnya terjadi perbedaan keseluruhan antara biaya yang direncanakan dan biaya aktual biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Analisis varians merupakan metode yang

digunakan untuk menentukan kontribusi setiap faktor terhadap varians keseluruhan (Sagara, 2021).

Varians anggaran dapat diketahui besarnya setelah anggaran terealisasi. Selisih anggar pendapatan dan realisasi pendapatan ini menunjukkan ketidak-akuratan dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan anggaran. Pada saat pemungutan pendapatan dilaksanakan, pelampauan atas target yang ditetapkan akan menjadi varians pendapatan. apabila seluruh pendapatan disetorkan ke kas daerah, maka varians pendapatan adalah selisih antara realisasi yang sesungguhnya dengan target dalam anggaran pendapatan. apabila tidak seluruh dan dari pelampauan pendapatan disetorkan ke kas daerah, maka varians pendapatan adalah selisih antara nilai pendapatan yang terealisasi dan disetorkan dengan target pendapatan (Abdullah & Nazry, 2015).

Analisis Varians memfokuskan pada 3 (tiga) aspek utama:

1. Varians Pendapatan (revenue variance): mengukur perbedaan antara biaya operasional yang dianggarkan dan biaya operasional aktual.
2. Varians Pengeluaran, terbagi menjadi 2 (dua) jenis:
 - Varians Belanja Rutin (current expenditure variance): mengukur perbedaan antara biaya operasional yang dianggarkan dan biaya operasional aktual.
 - Varians Belanja Investasi/Modal (capital expenditure variance): mengukur perbedaan antara biaya modal yang dianggarkan dan biaya modal aktual.

Meskipun analisis varians bermanfaat untuk menilai kinerja, metode ini memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasannya adalah kesulitan dalam menentukan signifikan besarnya varians. Hal ini dapat menjadi kendala dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan (Yuesti dkk., 2020).

Penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-

2019” Oleh (Fornia dkk., 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi secara umum berada pada level yang rendah. Hasil ini terlihat rasio kemandirian keuangan yang rendah dan rasio efisiensi belanja daerah yang berada pada level rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian rujukan adalah penulis akan menambahkan beberapa metode analisis kinerja keuangan, yaitu Analisis Varians Pendapatan Daerah yang digunakan untuk menganalisis selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi anggaran, Analisis Varians Belanja, Analisis Keserasian Belanja yang terdiri dari Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Dengan Menggunakan Analisis Varians Tahun Anggaran 2020-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan menjadi topik bahasan penelitian ini adalah:

Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020-2022 dengan menggunakan Analisis Varians Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Analisis Varians Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2020-2022 dengan menggunakan Analisis Varians

Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Analisis Varians Belanja, Analisis Keserasian Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

11 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Jambi memahami kinerja keuangannya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja keuangan. Pemerintah Kota Jambi diharapkan dapat mengambil langkah-langkah spesifik seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja pegawai, dan optimalisasi belanja modal untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

12 Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan memperdalam pengetahuan dan wawasan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi.

13 Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.